

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fasilitas

1. Pengertian Fasilitas

Menurut Putri Kiki (2019) Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang belajar (kelas), media belajar, meja dan kursi. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, meliputi halaman sekolah, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah.

Menurut Alif Mamuaya (2013) fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang.

Menurut Nur Halimah (2014) kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, dengan demikian sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat memengaruhi proses pembelajaran.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa fasilitas belajar adalah segala sesuatu baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak serta uang (pembiayaan) yang dapat mempermudah, memperlancar, mengefektifkan serta mengefisienkan penyelenggaraan kegiatan belajar guna mencapai tujuan belajar.

2. Fungsi Fasilitas Belajar

Fungsi fasilitas belajar membantu siswa dalam memahami apa yang telah disampaikan guru dan mempermudah guru dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Popi Sopiadin (2010) fungsi atau manfaat fasilitas atau media belajar, yaitu:

- a. Fasilitas belajar (media pembelajaran) yang ada akan menjadikan pengajaran atau belajar lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.
- b. Materi pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa.
- c. Fasilitas belajar (media pembelajaran) memungkinkan dilaksanakannya metode belajar mengajar yang lebih bervariasi.
- d. Siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar (belajar akan lebih fokus kepada siswa).
- e. Pemanfaatan sarana belajar dapat memperjelas pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.
- f. Meningkatkan dan menggairahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya serta memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan.
- g. Memberikan persamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya.

3. Jenis-jenis Fasilitas

Menurut Rosnaeni (2019) ditinjau dari jenisnya yaitu fasilitas dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Fasilitas fisik atau material yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan suatu usaha, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang tata usaha, perlengkapan sekolah, media pengajaran dan sebagainya.

Fasilitas non fisik yakni sesuatu yang bukan benda mati, atau kurang dapat disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan suatu usaha seperti manusia, uang, dan jasa. Fasilitas belajar dapat dikatakan lengkap apabila siswa memiliki fasilitas yang dibutuhkan dalam belajar, jadi dalam penelitian ini fasilitas yang di teliti yaitu data fasilitas fisik yang ada di SMPN 3

Sajingan Besar. Fasilitas belajar adalah sarana prasarana yang memperlancar proses belajar mengajar siswa agar tujuan pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Menurut Popi Sopiadin (2010) ruang lingkup fasilitas belajar sekolah meliputi:

a) Perencanaan pengadaan lahan

Lahan adalah letak tanah tempat berdirinya bangunan atau gedung. Letak tanah untuk mendirikan sekolah mempunyai hubungan yang signifikan dengan dampak pendidikan.

b) Bangunan sekolah

Bangunan sekolah adalah semua ruangan yang didirikan di atas lahan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bangunan sekolah meliputi ruang kelas, kantor, perpustakaan, ruang laboratorium, usaha kesehatan sekolah, kantin, gudang dan kamar mandi.

c) Perlengkapan sekolah

Perlengkapan sekolah terbagi menjadi dua yaitu benda-benda habis pakai (kertas, kapur tulis, bahan untuk praktikum) dan benda-benda tahan lama (kursi, meja, alat peraga atau media).

d) Media pengajaran

Media pengajaran merupakan alat bantu mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan guru dan bersifat sebagai pelengkap.

e) Sarana perpustakaan

Perpustakaan adalah gedung ilmu yang dikelola oleh petugas perpustakaan dimana sistem dan aturan pemakaian ditunjukkan untuk memudahkan penemuan informasi yang diperlukan secara sistematis.

Jadi fasilitas belajar sekolah merupakan segala sesuatu yang membantu memperlancar jalannya belajar.

4. Standar Sarana dan Prasarana Tingkat SMP

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 untuk kelengkapan sarana dan prasarana pada tingkat SMP:

a. Ruang Kelas

Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah hadir.

b. Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat tugas mengelola perpustakaan.

c. Ruang Laboratorium IPA

Ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.

d. Ruang Pimpinan

Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite, tugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.

e. Ruang Guru

Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.

f. Ruang Tata Usaha

Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah.

g. Tempat Beribadah

Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

h. Ruang Konseling

Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi sosial, belajar, dan karir.

i. Ruang UKS

Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah.

j. Ruang Organisasi Kesiswaan

Ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan.

k. Jamban

Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.

l. Gudang

Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah lebih dari 5 tahun.

m. Ruang Sirkulasi

Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pembelajaran, terutama ada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah.

n. Tempat Bermain/Berolahraga

Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007).

5. Manajemen Fasilitas Belajar

Menurut Suryani (2017) fasilitas belajar yang ada perlu diatur dan dikelola sebaik mungkin sehingga fasilitas belajar tersebut dapat

menciptakan kondisi belajar yang lebih baik. Manajemen fasilitas sekolah sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif. Tujuan manajemen fasilitas sekolah adalah sebagai berikut: sebagai upaya pengadaan sarana dan prasarana belajar yang dibutuhkan di sekolah. Melalui pengadaan fasilitas ini sekolah memenuhi segala sesuatu yang diperlukan atau menunjang proses pendidikan di sekolah.

Sebagai upaya dalam pemanfaatan atau pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada di sekolah, sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Mengupayakan pemeliharaan fasilitas sekolah, sehingga sarana dan prasarana tersebut selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan digunakan. Dalam proses manajemen fasilitas sekolah, perlu adanya suatu proses yang bertahap sehingga, manajemen dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

a. Perencanaan Kebutuhan

Merupakan suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas, baik yang berbentuk sarana dan prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dengan perencanaan pengadaan fasilitas tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.

b. Pengadaan

Pengadaan fasilitas pendidikan di SMP ada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya.

c. Pendistribusian

Pendistribusian atau penyaluran fasilitas pendidikan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu.

Dalam prosesnya ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya;

ketepatan sasaran penyampaiannya dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan.

d. Pemeliharaan

Merupakan suatu perawatan atau menjaga fasilitas pendidikan di SMP secara teratur agar semua fasilitas pendidikan di SMP selalu enak dipandang, mudah digunakan, dan tidak cepat rusak.

e. Penginventarisasian

Inventarisasi fasilitas pendidikan merupakan pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.225/MK/4/1971 barang milik negara adalah berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) ataupun dana lainnya yang barang-barangnya di bawah penguasaan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah otonom, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

f. Penghapusan

Merupakan kegiatan meniadakan barang-barang milik negara (bisa juga sebagai milik negara) yang jumlahnya berlebihan sehingga tidak digunakan lagi, dan barang-barang yang kuno yang tidak sesuai dengan situasi dari daftar inventarisasi dengan cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perlengkapan tersebut tetap dibiarkan atau disimpan, antara biaya pemeliharaan dan kegunaannya secara teknis dan ekonomis tidak seimbang.

6. Pentingnya Fasilitas Belajar

Kelengkapan fasilitas belajar dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Fasilitas belajar akan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Menggunakan fasilitas belajar akan mempermudah siswa mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, pencarian materi dengan

menggunakan sumber-sumber belajar yang disediakan oleh sekolah seperti perpustakaan akan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik dalam memahami materi pelajaran sehingga akan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Wina (2016) bahwa terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yaitu:

- a. Kelengkapan sarana prasarana dapat menumbuhkan gairah dan motivasi guru mengajar. Apabila mengajar dipandang sebagai proses penyampaian materi, maka dibutuhkan sarana pembelajaran berupa alat dan bahan yang dapat menyalurkan pesan secara efektif dan efisien. Ketersediaan sarana yang lengkap, memungkinkan guru memiliki berbagai pilihan yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi mengajar mereka.
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana dapat memberikan berbagai pilihan pada siswa untuk belajar.

Kelengkapan fasilitas belajar sangat dibutuhkan oleh semua sekolah. Selain kelengkapan fasilitas, pemanfaatan fasilitas juga diperlukan untuk efisien dan efektifitas fasilitas tersebut. Dorongan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana membutuhkan peran guru dalam memotivasi siswa untuk memanfaatkannya. Selain itu kelengkapan fasilitas belajar akan mempermudah guru dalam mencari bahan materi kepada siswa.

B. Penyelenggaraan Pendidikan SMP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dengan tujuan memberikan pendidikan bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam penyelenggaraannya wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pembangunan pada bidang pendidikan merupakan salah satu upaya mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, potensial dan produktif bagi

pembangunan, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Menurut Agung Iskandar (2012) meningkatkan mutu dunia pendidikan mutlak diperlukan guna menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan mandiri, serta mampu dalam menghadapi perkembangan iptek. Untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan yang bermutu, jelas diperlukan perhatian dan analisisnya terhadap segenap subsistem atau komponen pendidikan yang ada, di antaranya masukan siswa, sarana-prasarana, ketenagaan, biaya pendidikan, kurikulum, dan hasil belajar. Dan perlu diketahui bagaimana kondisi dari komponen-komponen tersebut, kemudian dianalisis sejauh mana pengaruh komponen tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar yang ada di wilayah perbatasan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional, seperti yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya hanya 9 tahun diselenggarakan selama 6 tahun di SD/MI dan 3 tahun di SMP/MTS. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk usia 6-15 tahun.

Menurut Udin S.Saud (2017) bentuk satuan pendidikan dasar formal yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut sebagai berikut:

1. SD/SMP Biasa, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam situasi yang normal.
2. SD/SMP Kecil, yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. SD/SMP Pamong, untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah.
4. SD/SMP Terpadu, yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan mental bersama anak normal dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah.
5. MI/MTS, yaitu berciri khas agama islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di bawah bimbingan Departemen Agama.

Menurut Udin S.Saud (2017) untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu di masa depan, pemerintah telah dan sedang melaksanakan berbagai strategi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, antara lain:

1. Pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun

2. Pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis
3. Pemberian inisiatif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil
4. Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk menunjang pendidikan untuk semua.

C. Perbatasan Indonesia-Malaysia

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia mencakup perbatasan darat dan perbatasan maritim. Rupita (2019) sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana, ekonomi, dan pendidikan yang sangat terbatas. Daerah perbatasan memerlukan sentuhan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu berdaya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM-nya. Melalui peningkatan kualitas SDM ini menjadi pintu masuk guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan. Dengan kata lain bahwa kualitas SDM masyarakat di perbatasan Kecamatan Sajingan Besar menjadi titik dalam melihat kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan.

Menurut pendapat para ahli politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Sedangkan *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu dengan yang lain. Maka pengembangan wilayah perbatasan Indonesia merupakan prioritas penting terhadap pembangunan nasional untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sajingan lebih mendekati pada kondisi yang ada di Jagoi Babang dari segi arus lintas batas manusia dan barang. Menurut Tirtosudarmo Riwanto (2012) Masyarakat yang ada di sekitar Sajingan adalah masyarakat Melayu yang telah memiliki jalur tradisional lintas batas ke negeri jiran di Serawak

sejak lama. Bahkan hubungan kultural antara masyarakat Melayu di Sambas secara umum dan masyarakat Melayu di Kuching sebagai ibu kota Serawak telah terjadi sejak masa pra kolonial. Hubungan kerabatan yang dekat antara masyarakat di kedua wilayah tersebut dapat ditelusuri melalui silsilah kekerabatan keluarga Keraton Sambas yang merupakan *family* dari keluarga Kerajaan Brunei yang dalam perjalanan menggunakan jalur pantai melalui Kuching. Daerah Sajingan kemudian menjadi jalur alternatif darat yang menghubungkan masyarakat Melayu di Sambas dan masyarakat Melayu di Kuching melalui Sungai Aruk. Jalur darat Sajingan ini memberikan kemudahan yang sangat berarti bagi masyarakat Sambas.

Sajingan baru saja memiliki pintu resmi lintas batas yaitu ketika PLB dibuka untuk jalur resmi di tahun 2012. Sajingan dengan demikian bernasib lebih baik dari Jagoi Babang yang sampai saat ini belum menjadi pintu resmi. Perhatian pembangunan di Sajingan masih tergolong rendah dengan bukti-bukti fisik yang dapat disaksikan saat ini. Jalan yang menghubungkan antara Kota Sambas sebagai ibukota Kabupaten Sambas dan Sajingan telah tersedia walaupun dengan kondisi yang masih sederhana. Sarana listrik pun sudah tersedia sehingga pengembangan sektor lain seperti perdagangan dapat berjalan. Bahkan, walaupun Sajingan menjadi daerah perbatasan yang saat ini memiliki kondisi yang hampir sama dengan Badau dari sisi pembangunan sarana fisik, namun ia memiliki persoalan nasionalisme yang lebih serius. Berdasarkan pendapat para ahli tentang fasilitas pendidikan maka pada penelitian ini peneliti menetapkan fasilitas yang akan dikaji meliputi 14 standar sarana dan prasarana tingkat SMP yaitu: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang lab IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, ruang beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007).

D. Pendidikan di Perbatasan

Kondisi ini merupakan kondisi umum di setiap perbatasan Kalbar dengan Malaysia. Fasilitas pendidikan di perbatasan Kalbar masih sangat

tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga itu. Sarana pendidikan di Malaysia tersedia dengan baik dan digunakan secara gratis. Fenomena yang terjadi di beberapa daerah perbatasan adalah banyak anak Indonesia lebih memilih untuk bersekolah ke Malaysia karena fasilitasnya lebih baik (Superman,2013). Kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini di bidang pendidikan selain kualitas yang masih rendah juga pemerataan yang belum terwujud sampai ke pelosok negeri. Secara umum, daerah perbatasan masih sangat kekurangan guru. Guru-guru yang berpendidikan tinggi umumnya pendatang dan kurang memahami budaya setempat serta tidak menetap dalam waktu yang lama.

Dalam bidang pendidikan kawasan perbatasan sangat memerlukan lebih banyak perhatian dan sentuhan, letak geografisnya sangat jauh dari ibu kota provinsi dan kabupaten, menjadi alasan mengapa pendidikan di sana kurang perhatian dan sentuhan. Alasan lain adalah belum ada akses jalan darat yang memadai, saluran komunikasi melalui telepon seluler maupun kabel tidak tersedia dan belum terjangkau aliran listrik.

Potret buram pendidikan di wilayah perbatasan tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Beranda terdepan Indonesia menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa sekaligus gudang terbelakang dalam pembangunan nasional termasuk bidang pendidikan. Pendidikan perbatasan sangat berbanding balik dengan apa yang terjadi di kota-kota besar, dan negara tetangga yang lokasinya memang tidak begitu jauh dan sangat terlihat jelas. Di Malaysia misalnya sekolah-sekolah dibangun dengan baik, terkadang dilengkapi asrama siswa. Guru-guru yang dikirim bertugas mengajar adalah guru muda yang cakap mengajar dan diberi gaji yang layak dan pantas.

Ketimpangan pendidikan dengan negara tetangga merupakan faktor utama penyebab mengapa anak-anak usia sekolah lebih memilih untuk menimba ilmu di negara tetangga. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai tenaga-tenaga guru yang berkualitas, biaya pendidikan yang gratis termasuk seragam dan buku-buku penunjang sampai jaminan kerja bagi anak-anak Indonesia yang berprestasi menjadi daya tarik magnet bagi mereka yang

berharap untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Potret umum siswa di perbatasan memang sangat memperhatikan. Namun, nasib para gurunya tidak kalah memperhatikan terutama para guru honorer yang kebanyakan honor komite. Berikut ini beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah perbatasan:

1. Kurangnya tenaga pendidikan dan kependidikan

Pembelajaran merupakan titik sentral sebuah proses pendidikan dan keberadaan guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Di daerah perbatasan sendiri, seringkali jumlah tenaga pengajar tetap hanya 1-2 orang saja sehingga dibutuhkan tenaga honorer atau kontrak untuk mencukupi kebutuhan guru yang kurang tersebut. Seringkali mereka hanya bertahan selama beberapa tahun saja, setelah itu kemudian mengajukan pindah sekolah.

2. Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Keterbatasan anggaran seringkali hanya dapat diterima dengan lapang dada oleh guru di daerah perbatasan. Adanya keterbatasan anggaran tersebut berimbas tidak semua guru di perbatasan mendapatkan tunjangan khusus.

3. Minimnya kualitas sarana fisik

Kualitas sarana fisik pendidikan adalah salah satu parameter penunjang proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan menjadi penentu keberhasilan pendidikan. Tetapi perhatian terhadap kualitas sarana fisik pendidikan sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan terlebih lagi bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah perbatasan.

4. Kurangnya kesempatan pemerataan pendidikan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga

perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar terbentuk manusia Indonesia seutuhnya, tertanam, ada setia diri manusia Indonesia insan yang paripurna jasmani dan rohani.

Seharusnya sistem pendidikan nasional harus mampu menyediakan kesempatan pemerataan pendidikan bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di daerah perbatasan.

5. Budaya pendidikan masih rendah

Di daerah perbatasan, kesadaran akan pentingnya arti pendidikan masih sangat kurang. Mereka lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Kondisi usia anak yang tidak lagi berada ada usia sekolah ini juga menjadi penghambat terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menyukseskan Program Belajar 9 Tahun. Dampak negatif adalah bahwa lulusan sekolah dasar atau yang putus sekolah dasar, lebih tertarik untuk pergi ke Malaysia untuk menjadi buruh kasar di sekitar informal, baik scara ilegal maupun legal. Dengan bekerja, mereka memperoleh penghasilan secara langsung. Mereka lebih tertarik dengan kegiatan atau kerjaan yang berkaitan langsung secara ekonomi dari ada pergi ke sekolah atau melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

E. Penelitian Relevan

Penulis telah menelaah beberapa hasil kajian penelitian, sebelum melakukan penelitian terhadap masalah yang didapatkan, yaiyu penelitian tentang fasilitas penyelenggaraan pendidikan sekolah SMPN 3 perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Seperti terhadap pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Moni Erlina Program Studi	Ketersediaan dan	Hasil penelitian ini	Perbedaan dalam penelitian ini	Persamaannya mengetahui

	Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat 2016	Pemanfaatan Sarana Prasarana Pendidikan di SMPN 1 Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya	adalah tentang standar sarana prasarana pendidikan di SMPN 1 Asam Jujuhan masih belum sesuai dengan lampiran pelaksanaan Permendiknas Tahun 2007	adalah tidak adanya manajemen sarana prasarana di sekolah	ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana sekolah di SMPN
2	Rika Arianti Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019	Manajemen Sarana Prasarana Dalam Proses Pembelajaran di SMP Sunan Giri Menganti Gresik	Hasil penelitian ini adalah dalam manajemen sarana prasarana dalam proses pembelajaran di SMP Sunan Giri Meganti berjalan dengan baik dan sekolah sudah mampu menjalankan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah kurang pemanfaatan manajemen sarana prasarana dalam proses pembelajaran harus diperhatikan dalam pemakaian serta penggunaan perlengkapan perabot sekolah	Persamaan dalam penelitian ini manajemen sarana prasarana dalam proses pembelajaran di SMP.